



DISKUSI PEMANTAUAN PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI K/L DIBAWAH KOORDINASI KEDEPUTIAN IV KEMENKO PEREKONOMIAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TA 2022

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Disampaikan dalam Kunjungan Kerja ke Bappeda Kab. Kebumen
Provinsi Jawa Tengah

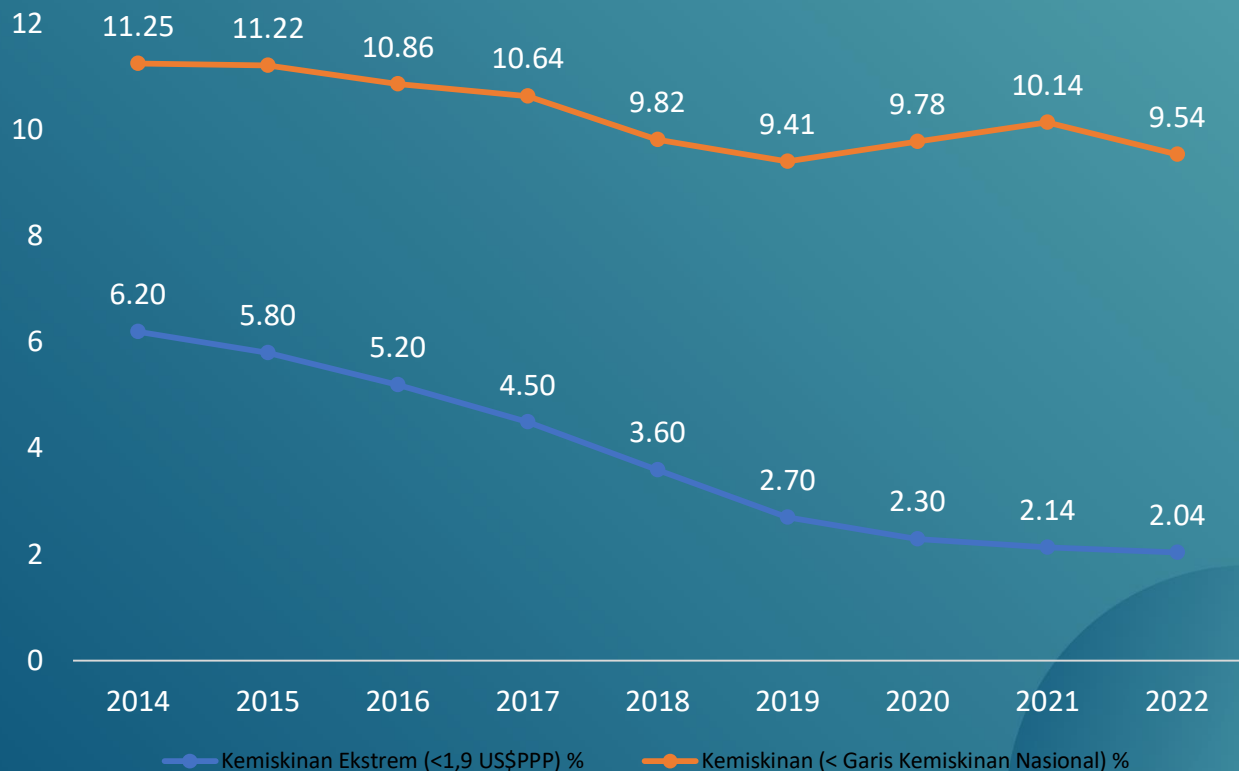
Kebumen, 21 Oktober 2022



Perkembangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

- Pada tahun 2022, penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin sebesar 9,54% menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,14%. Sementara itu, untuk penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem turut menurun dari 2,14% di tahun 2021 menjadi 2,04% di tahun 2022.
- Jika dibandingkan dengan Maret 2021 pemerintah telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 0,1 % atau sekitar 220 ribu jiwa.
- Membaiknya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh mulai terkendalinya wabah pandemi Covid-19 seiring dengan pulihnya perekonomian.

Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2014 – 2022



Konsep Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: BPS dan Bank Dunia

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Diktum Pertama

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar K/L dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Diktum Kedua

Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Diktum Ketiga

Pembagian Tugas dan Peran K/L, dimana **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian** diamanatkan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga dalam **upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas** dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (poin 2).

Diktum Keempat

Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Diktum Kelima

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Diktum Keenam

Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Diktum Ketujuh

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab

Pencapaian target kemiskinan ekstrem

0-1% di tahun 2024

dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi



Diktum Ketiga Poin 29 dan 30, Instruksi Presiden Kepada Kepala Daerah

29. Para Gubernur

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada RKPD Provinsi serta mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data *by name by address*;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Mendagri dengan tembusan kepada Menko PMK setiap 3 bulan sekali.

30. Para Bupati/Wali Kota

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kab/kota;
- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada RKPD Kab/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kab/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data *by name by address*;
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 bulan sekali.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2021

35 Fokus Wilayah di 7 Provinsi

Provinsi	Kab/Kota
Maluku	Maluku Tenggara Barat
	Maluku Barat Daya
	Maluku Tengah
	Maluku Tenggara
	Seram Bagian Timur
Papua Barat	Teluk Wondama
	Maybrat
	Tambrau
	Teluk Bintuni
	Manokwari Selatan
Papua	Jayawijaya
	Lanny Jaya
	Deiyai
	Puncak Jaya
	Mamberamo Tengah

Provinsi	Kab/Kota
Jawa Barat	Indramayu
	Karawang
	Kuningan
	Cianjur
	Bandung
Jawa Tengah	Brebes
	Pemalang
	Banyumas
	Kebumen
	Banjarnegara
Jawa Timur	Sumenep
	Bangkalan
	Probolinggo
	Lamongan
	Bojonegoro

Provinsi	Kab/Kota
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
	Sumba Timur
	Sumba Tengah
	Manggarai Timur
	Rote Ndao

Sumber: TNP2K

Hasil Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021



Sumber: BPS

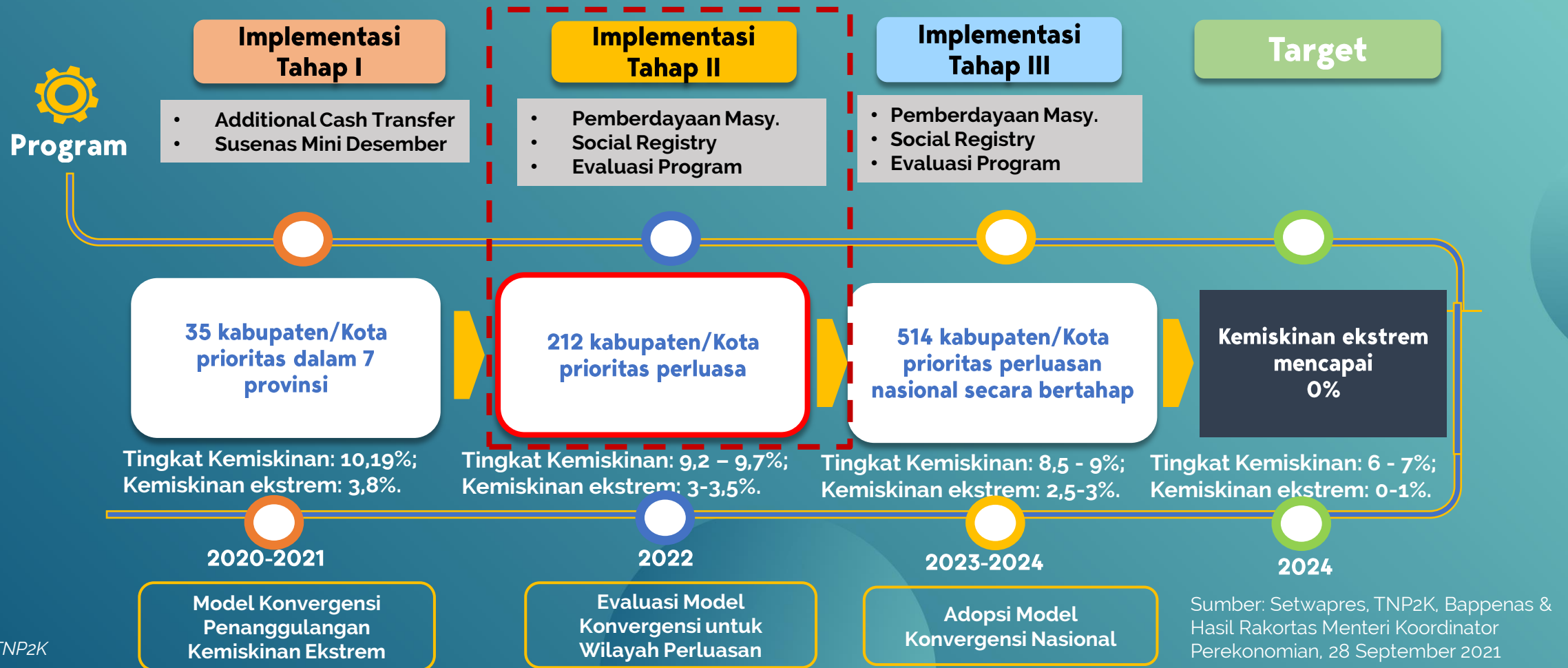
Rangkuman hasil SEPBS (BPS, Desember 2021):

- Secara nasional, terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas dari 7,24% (Maret 2021) menjadi 7,06% (Desember 2021)
- Dari 35 kabupaten prioritas kemiskinan ekstrem di tahun 2021, terdapat **21 kabupaten yang mengalami penurunan** persentase kemiskinan ekstrem dan **14 kabupaten yang mengalami peningkatan** kemiskinan ekstrem.

Sumber: TNP2K

Roadmap Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

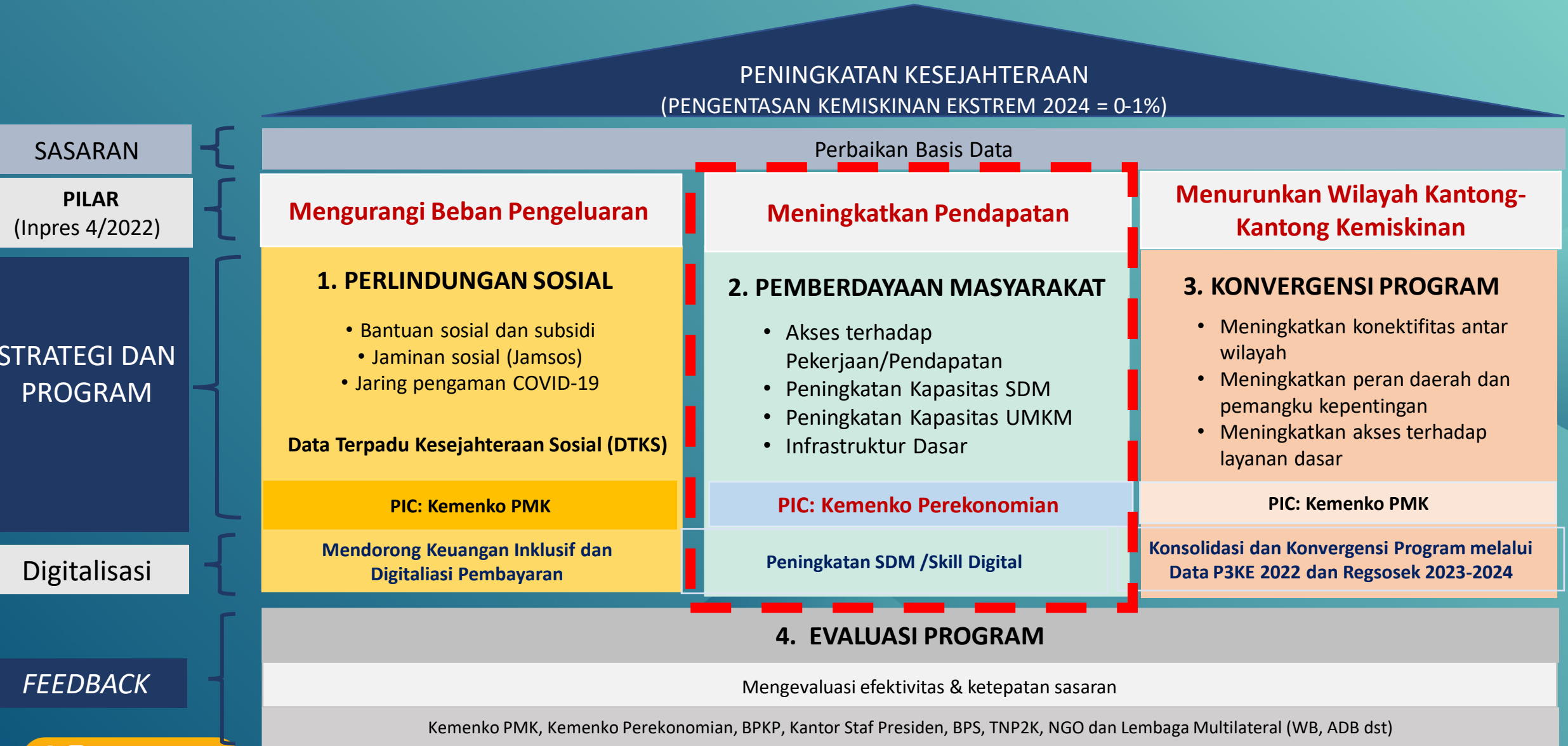
- **Jangka pendek:** pemberian *additional cash transfer* selama **3 bulan** yang difokuskan pada **35 wilayah** prioritas.
- **Jangka menengah:** diutamakan pada konvergensi **program pemberdayaan** dan **bansos**, pemberian *additional cash transfer* untuk RT miskin ekstrem diperluas ke **212 wilayah** prioritas, serta perbaikan *social registry*.



Sumber: TNP2K

Strategi Peningkatan Kesejahteraan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Melalui Konvergensi Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta melalui Perbaikan data sasaran dan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan sehingga menjadi lebih tepat sasaran



Pokja Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas PPKE

Tim Pengarah

Ketua Pengarah: Menko Perekonomian

Anggota Pengarah:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan – D1
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis – D2
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan UMKM, Riset dan Inovasi – D3
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah – D4
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri – D5
Deputi Bidang Koordinasi Penembagan Wilayah dan Tata Ruang – D6
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional – D7
Setwapres/Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Setwapres/TNP2K
Sekretaris Eksekutif KPC-PEN, Sdr. Raden Pardede
Staf Khusus Wakil Presiden, Sdr. Bambang Widiyanto.

Sekretaris Pengarah: Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Tim Pelaksana Harian

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Setwapres/Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Setwapres/TNP2K
Sekretaris Eksekutif KPC-PEN, Sdr. Raden Pardede

Ketua: Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal – D1

Wakil Ketua: **Asdep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan – D4**

Anggota:

Asdep Pangan – D2
Asdep Jasa Keuangan dan Industri Informasi – D3
Asdep Peningkatan Daya Saing – D5
Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi – D6
Asdep Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik – D7
Kepala Pokja Kebijakan TNP2K
Kepala Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K
Kepala Unit Komunikasi dan Kemitraan TNP2K



- Pokja bertugas **mengidentifikasi, memetakan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan, menyelaraskan** serta melaksanakan **monitoring dan evaluasi** program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dari K/L dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pokja dapat **melibatkan K/L, Pemda, stake holders, akademisi serta pihak lain** yang dipandang perlu.

KUNCI PENCAPAIAN TARGET KEMISKINAN EKSTREM DI 2024: KONVERGENSI PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PERBAIKAN PENSASARAN

- Hasil simulasi terbaik yang dilakukan Sekretariat TNP2K menunjukkan bahwa target kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di 2024 hanya bisa dicapai melalui **konvergensi program dan perbaikan pensasaran**.
- Konvergensi program terjadi jika:
 - ✓ Program pengurangan beban diterima oleh keluarga sasaran secara simultan sesuai kebutuhan dan eligibilitas.
 - ✓ Program pemberdayaan ekonomi mensasar wilayah miskin/tertinggal/terisolasi serta diterima oleh keluarga sasaran.
 - ✓ Program pengurangan beban dan pemberdayaan ekonomi saling komplemen satu sama lain.
- Konvergensi program dapat terjadi jika koordinasi antar K/L dan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa berjalan baik dan menggunakan sumber data yang sama.
- Sumber data pensasaran yang tersedia yaitu **DTKS dan Data P3KE dapat saling melengkapi** dan digunakan secara optimal untuk pensasaran keluarga miskin/miskin ekstrem dan mencakup *exclusion error*.

Sumber: TNP2K

Pensasaran Program Pemberdayaan untuk Keluarga Miskin Ekstrem

1. **Pensasaran secara tidak langsung** – Perlu dilakukan mengingat diperlukannya ekosistem dan kondisi usaha yang memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin ekstrem
 - i. **Pensasaran Wilayah** → 212 Kab/kota untuk tahun 2022
 - ii. **Pensasaran kawasan/desa/kantong kemiskinan/sektor**
 - a. Menggunakan data SUSENAS
 - b. Menggunakan data SAKERNAS
 - c. Menggunakan Poverty Mapping SMERU
 - d. Menggunakan Data estimasi dari PODES
 - e. Menggunakan Data estimasi dari SENSUS EKONOMI
2. **Pensasaran secara langsung** - berdasarkan data rumah tangga dan/atau pelaku usaha dengan informasi karakteristik ekonomi dan usaha dengan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemsikinan Ekstrem (Data P3KE)

Sumber: TNP2K

Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE)

- ✓ Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem membutuhkan data yang **akurat dan update**.
- ✓ **Data DTKS tidak** lagi memiliki informasi **rangking kesejahteraan dan karakteristik sosio-ekonomi**, sehingga cukup sulit mengidentifikasi KPM sasaran miskin ekstrem.
- ✓ Data P3KE disusun untuk memenuhi kebutuhan data sasaran kemiskinan ekstrem dalam jangka pendek dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi *bridging & pelengkap* data DTKS yang lebih *update*, ataupun **data Regsosek ke depan**.
 - ❖ Disusun berdasarkan arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, serta kolaborasi antara Kemenko PMK, BKKBN, Kemendagri, BPS, dan TNP2K.
 - ❖ Data P3KE adalah subset dari Data PK-BKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK (Dukcapil). Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021 merupakan data set by name by address yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga.
- ✓ Sebanyak 66,2 juta data keluarga telah dilakukan pemeringkatan dari Desil 1-Desil 10 (lebih luas dari data DTKS 29 juta KPM).
- ✓ Hasil exercise awal dari data P3KE desil 1 di 210 wilayah (3,491,954 keluarga) menunjukkan bahwa **exclusion error bansos beras mencapai 56%**. Data P3KE dapat mengidentifikasi *exclusion & inclusion error* penerima program.

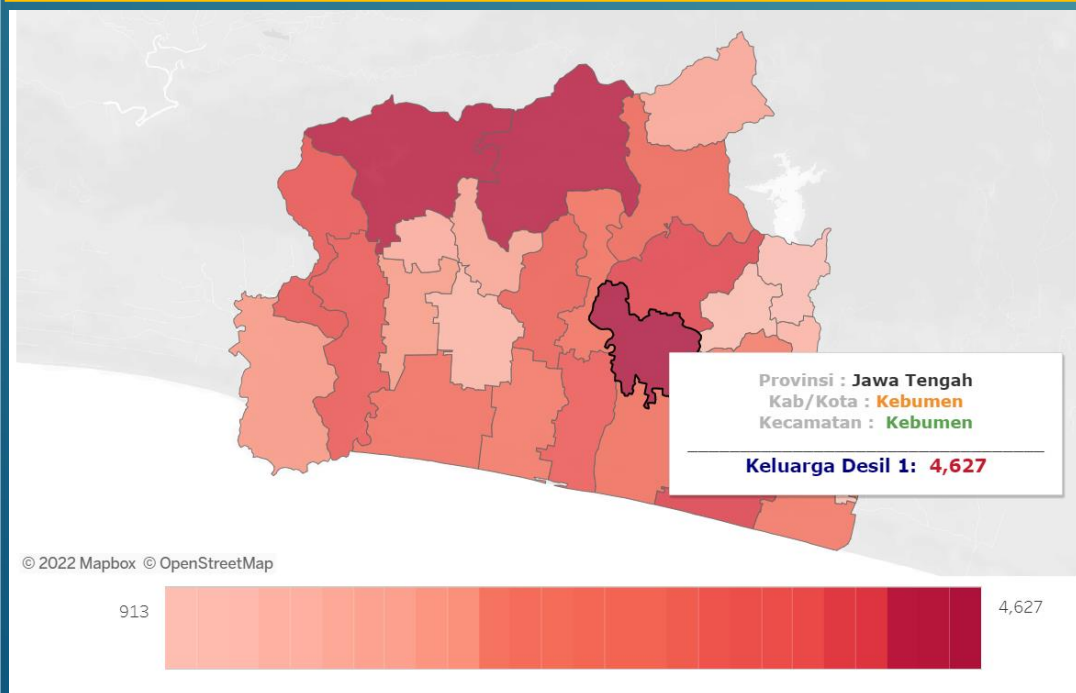


Kelompok Pengeluaran	Nasional
Desil 1	6,617,252
Desil 2	7,155,380
Desil 3	7,250,618
Desil 4	7,295,591
Desil 5	7,286,846
Desil 6	7,127,021
Desil 7	6,990,185
Desil 8	6,703,503
Desil 9	6,059,628
Desil 10	3,719,580
Total	66,205,604

Sumber: TNP2K

Data P3KE: Kabupaten Kebumen

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga					Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
	Total (35)	4.359.907	1.140.249	1.108.862	1.069.923	1.040.873	16.437.773	4.879.725	4.202.659	3.828.187	3.527.202
1.	Cilacap	245.264	59.524	63.825	56.532	65.383	946.129	266.409	249.968	206.458	223.294
2.	Banyumas	244.648	69.569	76.204	51.992	46.883	900.628	288.294	278.908	178.950	154.476
3.	Purbalingga	139.125	45.284	29.542	34.816	29.483	532.085	194.918	113.086	125.194	98.887
4.	Banjarnegara	126.879	44.323	31.529	29.033	21.994	483.585	190.384	117.862	101.844	73.495
5.	Kebumen	175.322	65.098	41.637	33.151	35.436	704.588	298.973	163.916	120.566	121.133



- Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), total rumah tangga miskin yang berada di Kab. Kebumen adalah 175.322 KK, dan total individu sebanyak 704.588 orang.
- Total yang berada pada Desil 1 adalah 65.098 KK dan 298.973 individu.
- Jumlah rumah tangga miskin yang berada pada Desil 1 terbanyak berada di Kecamatan Kebumen dengan total sebanyak 4.627 keluarga.

Sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran>

Konvergensi Program Melalui Peran TKPK

TKPK melibatkan unsur pemangku kepentingan terkait sesuai karakteristik daerah seperti OPD di bidang kelautan, perkebunan, pertanian, sosial, bappeda, UMKM, perdagangan, BUMD, swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

PROGRAM KEGIATAN

Melakukan koordinasi rutin di tingkat TKPK untuk sinergitas program seperti program pelatihan vokasi oleh OPD Pendidikan atau pelatihan UMKM yang kemudian diserap oleh pasar tenaga kerja ataupun akses kepada bantuan modal dari Bank.

ANGGARAN

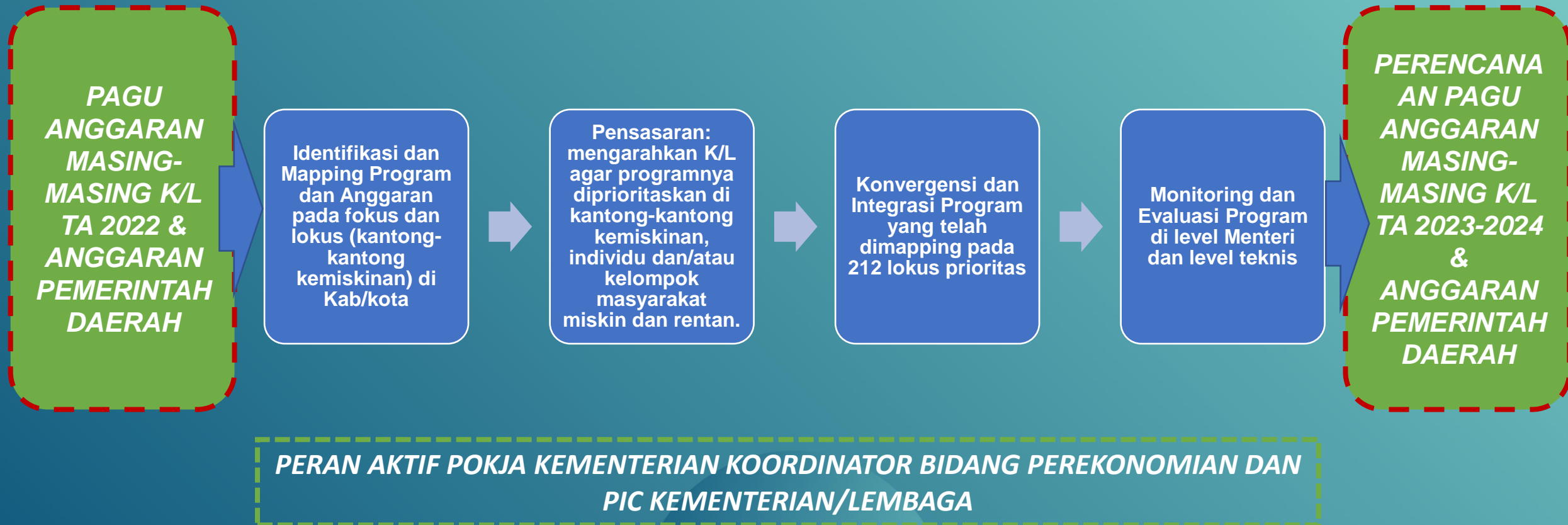
Terdapatnya sinergitas antara APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa dalam gotong royong pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. Sehingga tidak terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Apabila ditemukan masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah, dana CSR dari perusahaan dapat membantu menambal hal tersebut

DATA

Penggunaan basis data yang sama atau setidaknya bersinergi dengan data dari OPD lain membantu program kegiatan mampu menasar masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun swasta. Pihak swasta sebagai bagian dari TKPK dapat menggunakan data dari pemerintah dalam menyalurkan bantuan

Sumber: Kemendagru

KERANGKA KERJA INTEGRASI DAN KONVERGENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS



*)Anggaran Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari TKDD maupun dari APBD (Pendapatan Asli Daerah)

Dashboard Program Pemberdayaan Ekonomi K/L

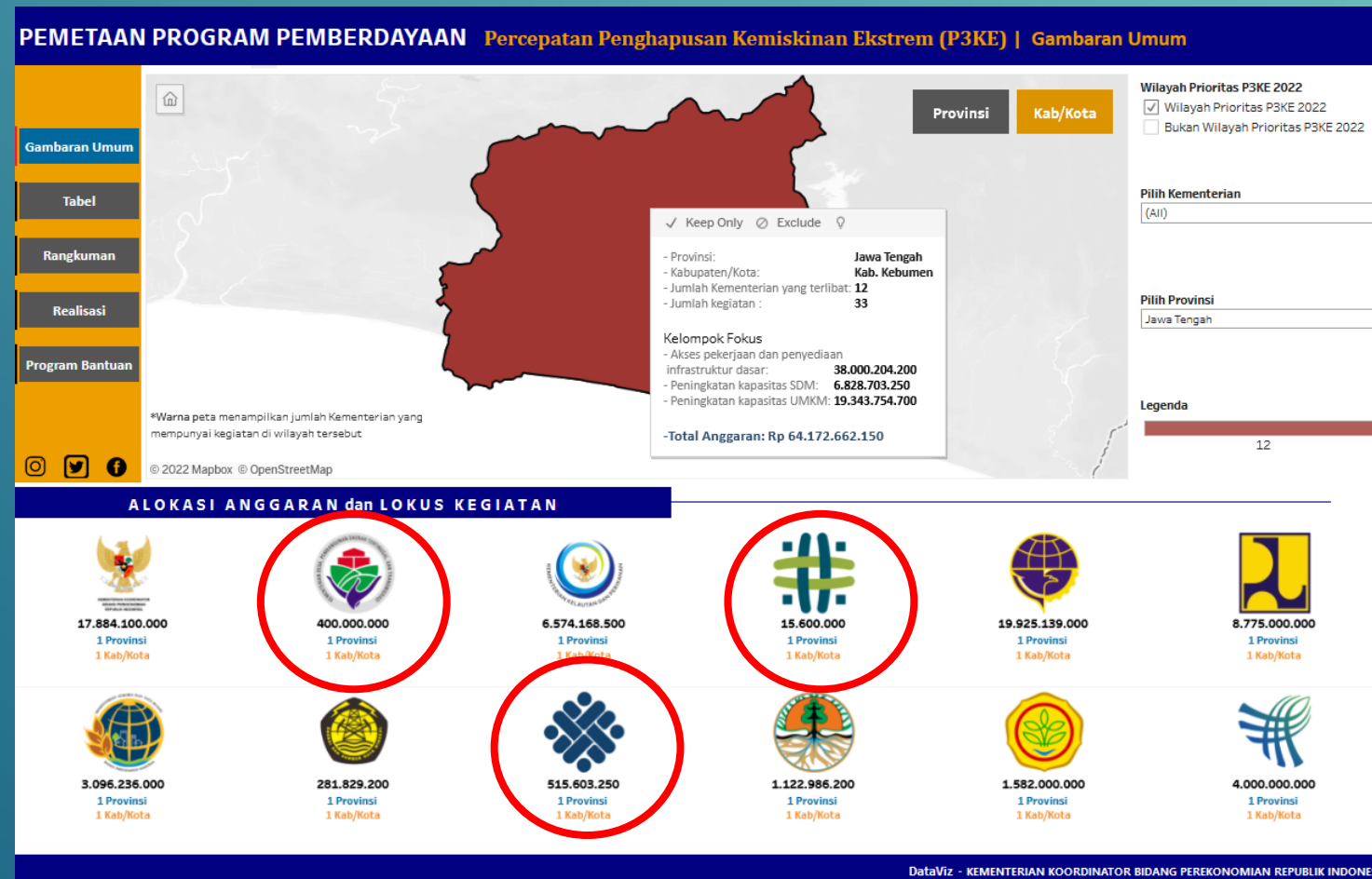
Dapat diakses di <https://tnp2k.go.id/ppkedata/pemberdayaan.htm>



Program Pemberdayaan 3 (tiga) Kementerian berada di bawah koordinasi Deputy IV Kemenko Perekonomian (Kementerian Desa PDPT, Kemenaker, dan Kemenkop UKM)

Program Pemberdayaan K/L di Kabupaten Kebumen

Dapat diakses di <https://tnp2k.go.id/ppkedata/pemberdayaan.htm>



Program Pemberdayaan 3 (tiga) Kementerian berada di bawah koordinasi Deputi IV Kemenko Perekonomian yaitu Kementerian Desa PDTT, Kemenaker, dan Kemenkop UKM

Program?kegiatan Kementerian/Lembaga TA 2022 di bawah Koordinasi Kedeputusan IV di Kab. Kebumen

No	Kementerian/ Lembaga	Program/Kegiatan	Target	Alokasi anggaran	Progress per September
1	Kementerian Ketenagakerjaan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	400 orang	1.894.622.000	Terealisasi 100%
		Padat Karya	160 orang	400.000.000	Tahap verifikasi
		Tenaga Kerja Mandiri	30 orang	60.000.000	Tahap Seleksi
2	Kementerian Desa PDDT	Sarana Prasarana Desa Wisata untuk Mendukung Desa Wisata	1 unit	400.000.000	Pengalihan lokasi
3	Kementerian Koperasi dan UKM	Pendampingan dan peningkatan bagi Usaha Mikro mengakses Kredit Usaha Rakyat		Nilai anggaran yang disalurkan sesuai hasil penilaian pihak bank	

Tujuan Diskusi

- ❑ Memperoleh informasi **proses implementasi program pemberdayaan khususnya terkait program 3 K/L T.A 2022, termasuk hambatan dan permasalahan, serta masukan perbaikan**
- ❑ Memperoleh informasi mengenai **program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta upaya sinergi/konvergensi yang dilaksanakan (pusat-daerah, antar-OPD, maupun dengan dunia usaha) serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi**



TERIMA KASIH

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Gedung Pos Ibukota, Lantai 5
Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1
Jakarta Pusat 10710



021-34832585
Fax.: 021-34832632